

Surat Tiba di Istana Presiden

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

kat menjadi PNS bisa dikabulkan Pak Jokowi. Karena inilah satu-satunya harapan yang bisa mengantarkan nasib kami lebih baik lagi sebagai guru," ucapnya.

Sebelumnya, GTKHnk35+ Karawang telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 3 Juli 2020. Surat berisi tuntutan mengangkat GTKHnk35+ menjadi PNS melalui Keppres (Keputusan Presiden).

Selain itu, surat juga berisi tuntutan agar Guru dan Tenaga Kependidikan Hon-

orer Non Kategori di bawah usia 35 tahun diberikan honor sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dibayarkan secara bulanan.

Kedua tuntutan tersebut merupakan hasil dari Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) GTKHnk35+ yang diikuti perwakilan dari 27 provinsi se-Indonesia pada 20 Februari 2020 di ICC MGK, Kemayoran, Jakarta.

"Terima kasih atas dukungan penuh Bupati Karawang, Disdikpora Karawang, DPRD Karawang, PGRI Karawang dan Wakil Bupati Karawang terhadap perjuangan kami dari awal hingga saat ini surat telah terkirim. Semoga dukungan terus diberikan hingga keinginan kami terealisasi," harapnya.

Diceritakan Dede, GTKHnk35+ berdiri secara nasional pada akhir Desember 2019. GTKHnk35+ lahir berawal dari kesamaan dan keprihatinan nasib guru honorer non kategori. Palsanya,

GTKHnk35+ sudah tidak bisa terakomodir baik untuk ikut CPNS maupun P3K karena tidak memiliki persyaratan khusus seperti K2.

"Untuk di Karawang, GTKHnk35+ terbentuk pada 5 Januari diawali di Rengasdengklok. 602 anggota GTKHnk35+ terdiri dari 489 guru SD negeri (154 laki-laki dan 335 perempuan), 100 guru SMP negeri (46 laki-laki dan 54 perempuan), dan 13 guru SMA/SMK negeri (6 laki-laki dan 7 perempuan) yang tersebar di 18 kecamatan," katanya. (ayi)